



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
*CALL FOR PAPER***

**Refleksi Pencapaian Reformasi
Birokrasi di Indonesia**

BANDUNG, 7 DESEMBER 2015

Prosiding Seminar Nasional
call for paper

REFLEKSI PENCAPAIAN
REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Unikom
2015

Prosiding Seminar Nasional *call for paper*

Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia

ix + 909 halaman (21 x 29 cm)

Penulis :

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom

ISBN : 978-602-72586-3

Editor :

Dewi Kurniasih
Poni Sukaesih Kurniati
Nia Karniawati
Tatik Fidowaty
Rino Adibowo
Tatik Rohmawati

Desain Sampul :

Gala Topan

Penerbit :

CV. Sheikow Mulia

Redaksi :

Jl. Karya Bhakti VIII No. 158 Cimahi 40522
Telp / Fax : 022-6657844
Email : sheikowmulia@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah, rahmat dan hidayahNya, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dapat menyelenggarakan Seminar Nasional *Call for Paper* pada tanggal 7 Desember 2015 dan menghasilkan Prosiding ISBN.

Seminar Nasional *Call for Paper* ini mengangkat tema Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia dengan sub tema yaitu (1) *E-government* dan Reformasi Birokrasi, (2) Efektivitas Kelembagaan Birokrasi, (3) Pelayanan Publik, (4) *Good Local Government* (daerah dan desa), (5) Perilaku Birokrasi, dan (6) Transparansi dan Akuntabilitas.

Seminar nasional ini diikuti oleh 51 *presenter* dan 33 partisipan yang terdiri dari mahasiswa S1/S2/S3, dosen, peneliti, praktisi, birokrat, dan pemerhati pemerintahan dari lembaga pendidikan dan pemerintahan yang ada di Indonesia.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Ucapan terima kasih kepada *presenter* dan partisipan yang telah berkontribusi dalam acara ini. Dan terima kasih pula kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan bekerja sama sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, 7 Desember 2015

**Ketua Panitia,
Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP.,M.Si.**

SAMBUTAN KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN

*Bissmilahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum wR.wB.*

Saya panjatkan puji dan syukur kekhadirat *Illahi Robbi* karena atas berkah dan rahmat-Nya Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dapat menggelar Seminar Nasional *Call For Paper* "Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia" pada tanggal 7 Desember 2015 ini.

Animo peserta yang sangat antusias, menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi di Indonesia masih memerlukan pencermatan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Melalui seminar nasional inilah diharapkan dapat melahirkan konsep dan gagasan baru yang dapat dijadikan sebagai input kepada Pemerintah.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Unikom, Dekan FISIP Unikom, Ketua APSIPI, panitia dan semua pihak yang telah berdedikasi tinggi menyelenggarakan kegiatan ini. Kepada seluruh peserta dan partisipan, saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga bermanfaat.

Salam Sinergi.

*Alhamdulillahirobbil alamin
Wassalamu'alaikum wR.wB.*

Bandung, 7 Desember 2015

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

SAMBUTAN DEKAN FISIP UNIKOM

Seminar Nasional *Call for Paper* ini merupakan salah satu Program dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Ini merupakan tindak lanjut dari Visi Unikom, Visi FISIP Unikom, Visi Prodi Ilmu Pemerintahan dalam upaya menjadi kampus FISIP yang mengikuti dinamika global dalam pengejawantahkan pengabdian pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan refleksi pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia.

Seminar Nasional *Call for Paper* ini menghasilkan prosiding yang terdiri dari artikel yang ditulis oleh mahasiswa S3, dosen, peneliti, praktisi, birokrat, dan pemerhati pemerintahan dari berbagai lembaga pendidikan dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ini merupakan sumbangsih, kontribusi terhadap dinamika pemerintahan Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada para Presenter dan Partisipan yang telah berpartisipasi dalam acara ini, dan terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan acara ini.

Bandung, 7 Desember 2015
Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KETUA PRODI ILMU PEMERINTAHAN UNIKOM	iii
SAMBUTAN DEKAN FISIP UNIKOM	iv
DAFTAR ISI	v
 <i>E-GOVERNMENT DAN REFORMASI BIROKRASI</i>	
Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi di Indonesia Kritis Analisis Ideologi Pancasila Peta Jalan Menuju Perubahan Perilaku Demokrasi (Lesmana Rian Andhika).....	1
Efektifitas Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Transformasional di Bidang Pelayanan Sipil (Ismanudin)	19
Reformasi Pelayanan Publik Sektor Persampahan di Kota Banjarmasin (Muhammad Riduansyah Syafari)	48
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Menggunakan Internet MeMe sebagai Upaya Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Tine Agustin Wulandari)	61
Problematika Birokrasi pada Era Reformasi di Indonesia (Utang Suwaryo)	75
Penerapan TIK di Pemerintahan Dalam Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Olih Solihin)	96
Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Kawasan Pesisir di Kota Tanjung Pinang) (Neng Suryanti Nengsih dan Dewi Kurniasih)	109
Reformasi Birokrasi Cita dan Fakta Memperbaharui Layanan Publik Daerah (Yana Fajar FY. Basori)	125
Penerapan Model G2G <i>E-Government</i> Dalam Para diplomasi Pemerintah Kota Bandung (Sylvia Octa Putri)	144
Reformasi Birokrasi Aparat Pengawasan Pemerintah Pekerjaan Besar Yang Belum Tuntas (Harsono)	156

EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN BIROKRASI

Penerapan Sistem Merit dalam Open Recruitment Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN (Suatu Pemikiran Kritis Analisis) (Dida Daniarsyah)	173
Efektivitas Kelembagaan Birokrasi (Solusi Perubahan Birokrasi Pada Dimensi Budaya Organisasi) (Yanhar Jamaluddin)	189
Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Efektifitas Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Peneliti LIPI di Era Reformasi Birokrasi (Lia Fitrianingrum)	207
Penerapan Good Governance Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Dewi Triwahyuni)	224
Penataan Kelembagaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Tata Ruang (Imas Sumiati)	232
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Cimahi (Suatu Tinjauan Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Kriteria Komitmen Institusi) (Poni Sukaesih Kurniati)	241
Akar Permasalahan Kebakaran Hutan Serta Solusi Dalam Penyelesaiannya (Studi Di Provinsi Riau) (Zainal)	258
Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program <i>Smart Card</i> di Kota Makasar (Muchlas M. Tahir dan Ahmad Hardian)	278

PELAYANAN PUBLIK

Mengurai Kusutnya Kualitas Pelayanan IMB (Arif Rahman Sudrajat)	300
Etika Birokrasi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik (Syafhendri)	319
Kesenjangan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Di Indonesia (Desita Rahayu)	343
Kualitas Pelayanan Penerapan Program One By Service Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Serang Prov. Banten (Titi Stiawati & Ridwan)	362

Kepemimpinan yang Melayani dalam Layanan Publik Baru (Khairul Rahman)	382
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Dalam Teori Post Modern (Tora Akadira)	406
Aksesibilitas Informasi Dalam Pelayanan Publik (Firdaus)	431
Implementasi Kebijakan Penguatan Desa Dalam Pelayanan Publik (Jabal Arafah)	445
 GOOD LOCAL GOVERNMENT 	
Pelajaran Positif dari Pengembangan Kampung Hijau sebagai Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Warga (Citizens Centered) di Kota Yogyakarta (Suswanta)	461
Menyoal Eksistensi Pemerintahan Negeri Di Sumatera Barat dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Desna Aromatica)	472
Implementasi <i>Good Government</i> Dalam Menciptakan Negara Indonesia Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme (Dian Wahyudin)	489
Kontribusi Kearifan Lokal Jawa Terhadap Kepemimpinan Nasional (Husen Maruapey)	507
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan Di Kota Bogor (Deden Muhammad Haris)	524
Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Studi di Kepulauan Sangehe Provinsi Sulawesi Utara (Burhan Niode dan Marthen L. Kimbal)	547
Tipologi Kecamatan Kabupaten Subang Provinsi Jabar (Fernandes Simangunsong)	571
Potensi Pemekaran Provinsi Papua Barat Ditinjau dari Aspek kependudukan (Demografi) (Imelda Hutasoit)	600
Peranan Hikam Tua (Kepala Desa) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Warembungan Kec. Peneleng Kab. Minahasa (Welly Waworundeng)	

Otonomi Daerah Sebagai Paradigma Baru Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi (Suatu Kajian Kritis Analisis) (Tatik Rohmawati)	636
Manajemen Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik dengan Model Triangle (Moore) (Lukman Muawar Fauzi)	645
Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah (Samugyo Ibnu Redjo dan Nia Karniawati)	656

PERILAKU BIROKRASI

Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makasar (Hamrun dan A.Luhur Prianto)	674
Politisasi Birokrasi Dalam Pilkada Langsung (La Ode Wahiyuddin)	696
Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Bekasi (Aos Kuswandi)	718
Pemerintahan Yang Bersih Dalam Sektor Keamanan (Yudi Rusfiana)	734
Membangun Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Titin Rohayatin)	745

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Mempertegas Akuntabilitas : Kajian Akuntabilitas Richard Mulgan, Mark Bovens dan Robert D Behn (Dzunuwanus Ghulam Manar)	776
Jaringan Transparansi Pemerintahan Multi Arah (Ahmad Subhan)	798
Tinjauan Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Indonesia (Suryanto)	821
Akuntabilitas Sektor Publik : Sebuah Analisis Kritis Terhadap Pembentukan Manajemen Organisasi Pemerintah (Kristian Widya Wicaksono, Nicky Dharmawan Kosasih, dan Gusti Mulyadi)...	834
Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Sarana Pembentukan Citra Pemerintahan (Inggar Prayoga)	848

Akuntabilitas Kebijakan Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau (Ranggi Ade Febrian)	858
Akuntabilitas Pemerintah Dalam Kebijakan HPHTI di Pulau Padang Kabupaten Meranti (Ahmad Fitra Yuza)	876
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) (Ony Widilestariningtyas dan Tulus Harefa)	891

PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROPINSI SULAWESI UTARA

Burhan Niode¹ dan Marthen L. KIMBAL²

¹burhan.niode@yahoo.com dan ²marthen_kimbal15@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu wilayah perbatasan negara Indonesia berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara. Wilayah perbatasan negara ini membatasi antara negara Indonesia dan negara Philippina. Wilayah perbatasan negara ini memiliki permasalahan dan menyimpan potensi konflik yang berdimensi lokal, nasional, dan regional sehingga dipandang perlu adanya penelitian berkaitan dengan pengelolaan wilayah perbatasan negara di wilayah tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh pemerintah? (2) Apakah pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan harapan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan tersebut?

Penelitian ini difokuskan di salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Kecamatan Kepulauan Marore, dengan pertimbangan bahwa Pos Lintas Batas untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di kecamatan ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-eksploratif. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari: *pertama*, pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapati melalui survey dan wawancara mendalam/terfokus (*indepth interview*) sebagai pedoman. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik penelitian ini dipilih karena sasaran data yang diperlukan adalah data kualitatif. Dan *kedua*, adalah pengolahan, interpretasi dan analisis data. Hasil dari pengolahan, interpretasi dan analisis ini berupa analisis keadaan sosial-ekonomi masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan negara, serta pengelolaan wilayah perbatasan oleh pihak pemerintah.

Dari hasil penelitian didapati hasil-hasil sebagai berikut: (1) Pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten telah berjalan dengan baik sehingga berdampak terhadap kualitas pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur (transportasi dan fasilitas listrik) dan pelayanan publik lainnya; dan (2) Masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe umumnya telah merasa puas dengan program pengelolaan wilayah perbatasan negara yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam pembangunan infrastruktur (transportasi dan pelayanan fasilitas listrik).

Kata kunci: pelayanan publik, pengelolaan wilayah, wilayah perbatasan negara.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia yang wilayahnya banyak berbatasan dengan negara lain merupakan kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan dari kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya), kemungkinan terjadinya kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), pemancingan ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*human trafficking*), imigran ilegal (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*peoples smuggling*), peredaran narkotika, pintu masuk teroris, perompakan dan konflik sosial-budaya berpotensi mengancam stabilitas nasional dan harus diantisipasi serta mendapatkan perhatian pemerintah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan tentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat antara lain mencakup keimigrasian, serta keamanan dan pertahanan. Dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan menjadi beranda depan negara. Program ini ditujukan untuk: (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak dan kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Sedangkan konsepsi awal kebijakan pengelolaan perbatasan negara dalam RPJM 2015-2019 adalah menciptakan kawasan perbatasan sebagai halaman depan dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga dengan memadukan pendekatan pembangunan terpadu antara pertahanan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan.

Permasalahan kawasan perbatasan berdasar *baseline* penyusunan RPJMN 2015-2019 adalah: (1) kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan relatif rendah (dihadapkan pada tantangan untuk berkompetisi dengan masyarakat di negara tetangga; (2) keterisolasian wilayah masih luas yang berhimpitan dengan tingginya keterbatasan infrastruktur; (3) kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah; (4) ketersediaan pelayanan dasar (sekolah, puskesmas, air bersih, telekomunikasi, logistik, dsb.) yang minim; (5) ketersediaan Sarpras hankam, Gakkum dan fasilitas pelayanan lintas batas yang masih rendah; (6) diplomasi perbatasan dan organisasi perundingan yang belum mantap dan optimal; (7) kewenangan dan kelembagaan pengelolaan perbatasan yang belum *established*.

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang secara administratif berada di wilayah Propinsi Sulawesi Utara merupakan daerah perbatasan negara Indonesia dengan negara Philipina. Wilayah perbatasan ini memiliki karakteristik permasalahan dan menyimpan potensi konflik yang berdimensi lokal, nasional, dan regional. Pertama, permasalahan yang berdimensi lokal dan domestik, yaitu gambaran kemiskinan dan lemahnya pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia (Tabloid Diplomasi, No 48 Tgl. 15 Oktober – 14 November 2011, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia). Kedua, permasalahan yang berdimensi nasional, yaitu munculnya berbagai kegiatan ilegal, diantaranya adalah *illegal fishing, illegal trade, illegal migration, illegal staying* (Ulaen dkk., 2012 : 133-134; Salindeho dkk., 2008 : 232 -236; Niode. 2014. "Analisis Terhadap Perjanjian Lintas Batas Antara Indonesia Dan Philipina Tahun 1974", Prosing, Presentase Ilmiah Seminar Humaniora: Kearifan Lokal dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Dalam Upaya Pembentukan karakter Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado: Wilayah Kerja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, Manado, 15 Desember 2014; Niode. 2015. "Beberapa Permasalahan Di Wilayah Perbatasan Negara", Prosiding Vol. IV of Seminar Multi Disiplin Ilmu, Universitas Trunojoyo, Madura 29 September 2015. Dan ketiga, permasalahan yang berdimensi regional, yaitu belum

ada kesepakatan tentang batas maritim antara negara Indonesia dengan negara Philipina (Tabloid Diplomasi, No 61 Tahun VI, 15 Februari – 14 Maret 2013, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia).

Memperhatikan masih belum optimalnya pengelolaan dan masih kentalnya permasalahan di wilayah perbatasan negara Indonesia dan negara Philipina maka dipandang perlu adanya kajian mengenai pengelolaan wilayah perbatasan negara Indonesia dengan negara Philipina.

Permasalahan

1. Bagaimanakah pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ?
2. Apakah pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan harapan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan tersebut?

Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh pemerintah?
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan wilayah perbatasan negara yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan harapan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan tersebut?

TINJAUAN PUSTAKA

Dari sudut pandang administrasi, manajemen dapat didefinisikan sebagai pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja. Adapun fungsi-fungsi pokok manajemen sebagai salah satu proses adalah: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian); *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengendalian) (Herujito, 2001).

Diilhami dari fungsi-fungsi manajemen, maka pengelolaan wilayah perbatasan pada aspek pengorganisasian merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena selama ini, menurut Purnomo Yusgiantoro ("Pengelolaan Perbatasan Mensinergikan Keamanan dan Kesejahteraan" dalam Tabloid Diplomasi, No 61 Tahun VI, 15 Februari – 14 Maret 2013, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 08), pengorganisasian wilayah perbatasan masih dilakukan sektoral dan secara parsial sehingga hasilnya belum dapat dilihat, dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menjadikan pengelolaan wilayah perbatasan menjadi tidak efektif dalam tujuan yang ditetapkan atau bahkan untuk mengatasi persoalan-persoalan di daerah perbatasan yang cukup rumit dan kompleks.

Ernest Dale dalam Stoner (1988) menguraikan proses pengorganisasian sebagai suatu proses multistep terpadu yang meliputi langkah-langkah berikut:

1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang;
3. Mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama secara logis menjadi departemen-departemen dan menyusun skema kerja antardepartemen;
4. Menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota koordinasi dalam kesatuan yang harmonis. Apabila individu atau departemen tidak melakukan aktivitasnya yang spesifik, tujuan organisasi secara keseluruhan akan terabaikan dan menimbulkan konflik di antara mereka;
5. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

Adapun prinsip-prinsip organisasi yang harus dijadikan pedoman bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, menurut Herujito (2001), adalah:

- 1) Perumusan tujuan organisasi dengan jelas;
- 2) Pembagian kerja (spesialisasi);
- 3) Prinsip kontinuitas dan fleksibilitas;
- 4) Delegasi wewenang dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang;
- 5) *Unity or Direction* (kesatuan arah);
- 6) *Unity of Command* (kesatuan komando);
- 7) *Span of Control* (rentang kekuasaan);

8) Tingkat-tingkat pekerjaan atau *employment hierarchies*;

9) Prinsip koordinasi.

Berbagai prinsip-prinsip tersebut mutlak diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wikayah perbatasan negara sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Philipina yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kecamatan Kepulauan Marore. Pilihan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa *Border Crossing and Exit Station* (Pos Lintas Batas) untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di kecamatan ini⁶³.

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif- eksploratif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan pengelolaan wilayah perbatasan negara yang dilakukan oleh pemerintah serta tanggapan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari: *pertama*, pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapati melalui survey dan *indepth interview*. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dan *kedua*, adalah pengolahan, interpretasi dan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara

Melalui UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pemerintah diberikan mandat untuk membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah, maka melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dibentuklah Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP). BNPP sendiri merupakan lembaga lintas sektoral yang memiliki fungsi

⁶³ Dalam *Revised Agreement on Border Crossing between The Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia* Thn. 1975 disebutkan bahwa daerah perbatasan Indonesia meliputi, antara lain: kelompok kepulauan Kawio (Pulau Marore, Pulau Kamboleng, Pulau Kawaluso, Pulau Mamanuk, Pulau Matutuang, dan Pulau Dumarehe). Adapun Pos Lintas Batas (*Border Crossing Entry and Exit Station*) antara berada di Marore.

koordinatif dan lembaga ini secara otomatis dipimpin Menteri Dalam Negeri. Kondisi ini harus dipahami karena pengelolaan wilayah perbatasan adalah pekerjaan lintas lintas sektoral, dimana anggota BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 12 gubernur yang memiliki wilayah perbatasan termasuk Sulawesi Utara.

Adapun tugas BNPP sesuai UU Nomor 43 Tahun 2008 pasal 15 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 pasal 3 yaitu: (1) menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; (2) menetapkan rencana kebutuhan anggaran; (3) mengkoordinasikan pelaksanaan; (4) melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Dalam kerja lintas sektoral ini pengelolaan wilayah perbatasan, sebagaimana RPJM ditujukan dalam strategi untuk: pengembangan ekonomi lokal; penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemda dalam pengelolaan sumberdaya lokal; peningkatan aksesibilitas dari daerah tertinggal ke sentra-sentra produksi di pusat pertumbuhan; peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; peningkatan status gizi masyarakat; peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas; peningkatan keterampilan angkatan kerja; dan peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi.

Karena sederet masalah inilah, kawasan perbatasan menjadi isu strategis. Bahkan, dalam pengambilan kebijakan pembangunan ada kecenderungan kawasan perbatasan menjadi semacam komoditas isu dan mendapat "banjir" program, yang sering tumpang tindih dan kurang bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Begitu juga halnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jika menjual isu perbatasan maka akan memperoleh manfaat program dari pemerintah pusat, karena dari 70 kabupaten/kota tertinggal yang ada di perbatasan, sebanyak 14 kabupaten/kota diprioritaskan, dimana kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk salah satu diantaranya.

Pemerintah Pusat dan Provinsi: Sinergi dan Kerjasama Pengelolaan, Pembangunan Fasilitas dan Pelayanan di Kawasan Perbatasan

Dari tiga kampung (Marore, Kawio, dan Matutuang) yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore, Kampung Marore memiliki karakteristik geografis tersendiri, karena posisinya sebagai pemukiman paling utara di antara dua kampung lain dan lebih dekat dengan negara tetangga, sehingga Pos Lintas Batas, kantor imigrasi, serta beberapa institusi dalam fungsi pertahanan-keamanan berada di kampung ini. Kondisi ini membuat Kampung Marore menjadi pusat kegiatan pelayanan publik di kecamatan ini. Di bawah ini akan dideskripsikan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan dua isu mendasar yaitu infrastruktur dan perekonomian warga.

Tahun 2015 ini, pemerintah berkomitmen untuk merubah secara total wajah perbatasan Indonesia, baik kesejahteraan masyarakatnya, pengamanannya, kualitas SDM-nya, serta infrastrukturnya. Atas dasar itu, Presiden menunjuk Menko Polhukam dengan melibatkan TNI dan Kepolisian untuk membangun infrastruktur dermaga, mercusuar, asrama, dan kerja sama dengan kementerian terkait untuk membangun kawasan perbatasan negara. Tahap pertama, program percepatan pembangunan kawasan perbatasan diprioritaskan bagi 50 kecamatan. Kecamatan Kepulauan Marore ditetapkan menjadi salah satu Lokasi Prioritas program (LOKPRI).

Kecamatan Kepulauan Marore relatif telah memiliki infrastruktur yang cukup representatif untuk kebutuhan warga. Ini dapat dilihat dari adanya dermaga representatif di tiap kampung, serta adanya Kantor Polsek dan Pos Polisi serta Pos TNI Batalyon Infanteri 712 juga Pos TNI AL. Kualitas jalan desa juga sudah memadai untuk menunjang kegiatan perekonomian warga. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah pembangunan yang sepertinya kurang tepat sasaran sehingga menyebabkan tidak berfungsinya beberapa infrastruktur yang dibangun. Relatif semua gudang logistik yang dibangun oleh Bulog di tiap kampung

menjadi bangunan kosong dan tidak berfungsi. Salah satu alasannya, bahwa ketahanan pangan warga tidak bergantung pada pasokan beras.

Hal lain yang patut diperhatikan yaitu pembangunan tempat produksi es yang berada di Kampung Matutuang tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak berfungsi karena tidak dibarengi pasokan listrik yang memadai. Pada akhirnya, fasilitas tersebut terancam rusak karena berkarat akibat faktor korosi yang tinggi karena tepat berada di samping dermaga atau di bibir pantai. Program-program semacam ini terlihat mubasir karena sering berorientasi pada pembangunan fisik semata dan kurang memperhatikan kontinuitas dengan dukungan fasilitas penunjang dan SDM memadai.

Program Pengelolaan dan Fasilitasi Pihak Swasta dan Lintas Sektoral

Selain program-program yang dilakukan secara sporadis oleh pihak pemerintah melalui kementerian ataupun lembaga non-kementerian, ada juga program-program yang koordinasinya lintas departemen atau lembaga pemerintah non departemen, BUMN, bahkan dengan pihak swasta.

Seluruh wilayah di kecamatan Kepulauan Marore mendapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Sejumlah program pembangunan digelar lewat program ini. Berbeda dengan kegiatan pembangunan lainnya, PNPM mengambil pola kegiatan berdasarkan usulan dari masyarakat sendiri, dan mereka pula yang mengerjakan (*community driven development*). Dalam pembangunan model PNPM, masyarakat mengusulkan program apa yang akan digelar di wilayah mereka. Setiap desa membawa proposalnya untuk berkompetisi dengan desa-desa lain. Dalam kasus Kampung Matutuang misalnya, beberapa ruas jalan desa dibangun melalui program ini. Ada juga fasilitas air bersih dan sanitasi (kamar mandi umum) yang dibuat, tetapi saat kunjungan lapangan fasilitas-fasilitas ini justru teronggok dan tidak digunakan, yang tersisa hanya bangunannya dan logo PNPM.

Dari ketiga kampung yang ada di kecamatan ini, Kampung Marore merupakan wilayah yang paling diuntungkan. Sebagai pusat kecamatan, wilayah ini memiliki tower telkomsel dan bahkan memiliki koneksi internet sehingga terbantuan dalam melaksanakan aktivitas sosial, dan pekerjaan untuk instansi pemerintahan. Sementara Kampung Kawio hanya mendapatkan sinyal di wilayah dekat dermaga karena lemahnya signal yang memancar dari Marore. Kampung Matutuang sama sekali tidak menikmati fasilitas komunikasi ini. Jadi, untuk keadaan darurat, komunikasi dilakukan dengan mengirim kurir atau lewat radio komunikasi di rumah dinas *Opolao* yang juga berfungsi sebagai kantor. Persoalan komunikasi melalui internet ini juga menjadi salah satu persoalan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada bulan November tahun 2014, melalui pertemuan lintas sektoral antara badan Pengelola Perbatasan Propinsi dan Kabupaten serta KADIN Sulut disepakati bahwa Kadin Sulut akan menghubungi pihak provider guna mengatasi persoalan komunikasi yang dimaksud. Pihak provider sudah sepakat akan memberdayakan para siswa SMK di kabupaten ini melalui pelatihan pengoperasian dan perawatan peralatan provider yang ditempatkan di masing-masing pulau sehingga persoalan konektivitas dapat diselesaikan sendiri oleh siswa di kepulauan. Namun saat studi lapangan, hal ini masih wacana karena persoalan koneksi internet dan seluler di Kecamatan Marore baru dapat terselesaikan di Kampung Marore.

Berkaca pada pengalaman masa lalu, ketersediaan listrik merupakan persoalan klasik yang dihadapi warga di kecamatan ini. Namun sekarang ini, untuk kebutuhan sehari-hari nampaknya hal ini sudah tersedia. PLN bersama instansi terkait yang mengurus wilayah perbatasan relatif telah berhasil melayani kebutuhan listrik warga selama 24 jam lewat pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang menggunakan *solar cell*. Sekalipun tidak untuk kebutuhan listrik yang besar, namun listrik yang ada wilayah ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan beberapa peralatan elektronik seperti TV dan

handphone. Wilayah yang paling terakhir mendapatkan fasilitas ini adalah Kampung Matutuang yang belum sampai setahun menerima fasilitas ini. Namun begitu, fasilitas listrik di daerah inipun masih belum stabil, karena sering terjadi pemadaman. Apalagi PLN tidak menempatkan teknisi yang tinggal permanen untuk mengurus masalah pembangkit listrik, terkecuali di Kampung Marore.

Pada pihak lain, kerjasama lintas sektoral yang paling signifikan di daerah dan langsung dirasakan masyarakat adalah ketersediaan sarana transportasi yang cukup memadai dan memberdayakan masyarakat. Untuk melayani transportasi di pulau-pulau ini Pelni dan Kementerian Perhubungan baru saja mengoperasikan kapal perintis yang representatif dan tiketnya terjangkau, bernama Sabuk Nusantara 38 dan Sabuk Nusantara 51. Sedangkan yang dioperasikan oleh pihak pelayaran swasta yakni Metro Teratai dan Karya Indah. Selain itu masih juga beroperasi kapal perintis lama yaitu Daya Sakti dan kadangkala Meliku Nusa serta KM. Sangiang. Keberadaan dua kapal baru ini, tidak hanya dirasa membantu transportasi dan kegiatan ekonomi warga tetapi juga mengangkat martabat mereka. Ini terlihat dari wawancara berikut ini:

Memang katu torang so dianggap manusia sekarang lantaran so ada di Sabuk Nusantara. Dulu kalo nae Daya Sakti ato Daraki Nusa, torang dapa rasa sama deng binatang. Torang tidor sama-sama deng barang-barang, semen, rica deng bawang-bawang deng sagala macam bahkan deng binatang-binatang ternak sama deng ayam.

[memang sekarang kita telah dianggap manusia karena telah dilayani kapal Sabuk Nusantara. Dahulu, jika naik Daya Sakti atau Daraki Nusa, kami merasa seperti binatang. Kami tidur bersama dengan barang-barang, semen, cabe dan bermacam bawang serta berbagai jenis barang lain, bahkan dengan binatang ternak lain seperti ayam]

Melalui hasil wawancara di atas, tergambar bahwa warga merasa dimanusiakan dengan keberadaan kapal-kapal ini, mengingat fasilitasnya yang nyaman dengan ruangan full AC, café mini dan kasur yang bersih, termasuk fasilitas kamar mandi dan WC yang bersih. Bahkan harga tiketnya sangat terjangkau. Jadi ini tidak hanya menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan kehidupan ekonomi karena dapat mengangkut hasil

alam berupa hasil laut serta pertanian dan perkebunan, tetapi juga secara tidak langsung memberi sentuhan persuasif dari aspek kemanusiaan.

Program lain yang cukup berhasil dilakukan dan mendapat respons positif serta berkesan bagi masyarakat adalah dalam bidang pendidikan dari pihak Swasta yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Mengajar lewat program Indonesia Mengajar. Ketiga kampung di kecamatan ini sejak awal program merupakan daerah penempatan guru Indonesia Mengajar. Bahkan di tahun-tahun awal program, guru diijinkan untuk menjadi wali di salah satu kelas SD. Penempatan guru lewat program ini memberikan inspirasi dan kesan mendalam dalam membangun SDM warga perbatasan, terutama generasi mudanya.

Dari penjelasan bagian ini, dapat dipahami bahwa pihak swasta dan lintas sektoral juga berperan penting dalam mengelola wilayah perbatasan baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga kerja sinergi semacam ini sangat penting untuk dilakukan. Bahkan dalam aspek tertentu, beberapa pihak swasta memiliki catatan tersendiri karena memberi fokus dalam pengembangan aspek kemanusiaan, SDM dan lebih fokus ke generasi muda.

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Oleh Pemerintah Kabupaten

Dalam hal pengelolaan kawasan perbatasan, atau tepatnya pendirian lembaga yang fokus menangani isu ini, Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan *pioneer* di Indonesia karena kabupaten ini merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang mendirikan Badan Pengelola Perbatasan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, yang nomenklatur resminya bernama Badan Pengelola Wilayah Perbatasan, Pulau-pulau Terluar Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahkan lebih dahulu ada dibandingkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Badan ini, sebagaimana penjelasan Sekretaris Badan, bukan lembaga yang secara teknis langsung memiliki anggaran pengembangan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi lebih merupakan lembaga penghubung yang

koordinatif untuk menyediakan data lapangan, mempercepat program dari dinas terkait atau pelaksana dana-dana APBN untuk pengembangan kawasan perbatasan. Dalam hal ini, sekalipun memiliki kekurangan dalam penganggaran, tetapi fungsi strategis lembaga justru terletak pada kemampuan di lapangan, penyediaan data dan wewenangnya yang koordinatif sehingga lebih responsif pada masalah-masalah dan isu-isu. Program yang dikembangkan dengan dinas-dinas terkait tidak hanya pembangunan infrastruktur tetapi lebih luas ke isu-isu demografi, semisal dalam fungsi koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri untuk program naturalisasi warga perbatasan dari Warga Negara Filipina ke WNI. Atau bahkan menyangkut isu-isu status kewarganegaraan penduduk Sangihe di pulau-pulau kecil wilayah perbatasan, perdagangan ilegal (*illegal trading*) dan aktivitas nelayan ilegal antar negara (*illegal transhipping*) bahkan bongkar-muat ilegal (*illegal transhiping*).

Secara umum keberadaan badan ini telah membantu akselerasi percepatan pembangunan fasilitas infrastruktur dan pembangunan SDM kawasan perbatasan di Kecamatan Kepulauan Marore. Fasilitas-fasilitas yang dibangun digunakan sesuai manfaatnya masing-masing. Mess aparaturnya yang dibangun ditinggali oleh *Opolao*, bahkan sering menjadi Kantor Desa disamping sarana hiburan warga kampung karena di dalamnya tersedia TV, fasilitas listrik dan antena frekuensi untuk menangkap siaran TV. Mess dibangun secara sederhana dan memiliki fasilitas yang cukup memadai karena memiliki kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu dan dapur. Karenanya kepala sekolah dan Pendeta Jemaat sering memanfaatkan fasilitas ini sebagai tempat tinggal. Pada waktu-waktu tertentu ketika ada kunjungan tamu atau inspeksi dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat mess inilah yang digunakan sebagai pemondokan. Di mess ini tersedia pula fasilitas radio frekuensi yang digunakan oleh pemerintah dan warga untuk berkomunikasi dengan Badan Pengelola Perbatasan di Tahuna (ibukota kabupaten) ketika ada kejadian-kejadian darurat.

Sekalipun cukup berhasil, beberapa fasilitas yang dibangun atau disediakan melalui badan ini memang belum secara maksimal termanfaatkan, seperti Gudang Logistik yang lebih sering kosong dan kurang bermanfaat. Namun yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah pengadaan kapal serbaguna, KM. Tampunganglawo, dimana menurut warga kapal ini lebih sering sandar di dermaga dan tidak dimanfaatkan warga perbatasan ataupun dalam tugas-tugas aparat di perbatasan.

Pada sisi lain, fasilitas fisik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait di tiga kampung perbatasan ini sebenarnya sudah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan warga. Fasilitas kesehatan misalnya, di Kampung Marore memiliki puskesmas dengan seorang dokter yang tinggal dengan warga, sementara di Kampung Kawio dan Kampung Matutuang memiliki Puskesmas Pembantu dengan menempatkan masing-masing seorang bidan/perawat yang juga tinggal dengan warga. Untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan *primary health care* di kawasan ini, hal ini tentu cukup memadai kecuali jika ada kondisi-kondisi darurat yang memang intensitas terjadinya sangat kecil. Dalam kondisi ini, kapal perintis ditunggu untuk merujuk pasien ke kabupaten. Sehingga perlu dipikirkan penyediaan fasilitas rawat inap sederhana guna mengatasi kondisi semacam ini. Fasilitas kesehatan yang justru sering terhambat adalah suplai obat-obatan dan alat kesehatan untuk melayani warga. Disamping itu, ada juga fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah terbengkalai di Kampung Kawio dan kampung Matutuang, yaitu fasilitas Puskesmas Keliling dalam bentuk perahu motor yang benar-benar tidak terpakai dengan alasan kurang anggaran perawatan dan operasional. Tetapi jika melihat kebutuhan *primary health care* warga dengan permasalahan keseharian yaitu sakit demam, diare dan maag maka fasilitas semacam ini memang tidak efektif disediakan karena telah ada puskesmas pembantu di masing-masing kampung. Sehingga dapat dikatakan penyediaan fasilitas ini hanyalah pemborosan anggaran.

Dalam bidang pendidikan, fasilitas fisik sesuai kebutuhan siswa dan guru, terutama bangunan kelas, ruang guru bahkan rumah dinas guru telah cukup terpenuhi. Di Kampung Kawio sekolah yang ada hanya sampai tingkat SD yaitu yang dimiliki GMIST (Gereja Masehi Injili Sangehe-Talau), sementara di Kampung Matutuang memiliki SD-SMP satu atap, dimana gedung SMP merupakan fasilitas pembangunan yang dibangun pemerintah kabupaten lewat dana Kemitraan Indonesia-Australia. Sementara, di Kampung Marore memiliki fasilitas pendidikan terbaik di kecamatan ini karena memiliki TK, SD, SMP dan SMA. Namun begitu, masalah yang justru dirasakan adalah minimnya tenaga guru, karena beberapa yang seharusnya mengajar di daerah perbatasan justru berada di luar daerah penugasan tersebut. Standarisasi guru yang mengajar di daerah ini juga perlu mendapat perhatian.

Sementara dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) permasalahannya terletak pada regulasi, yang akhirnya memperlambat pencairan dan berimbas pada terhambatnya pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Tahun 2015 misalnya, ADD terlambat dicairkan sehingga: (1) dana operasional desa menggunakan dana pribadi dari *Opolao*; (2) bertumpuknya program yang akan dilaksanakan bersama laporannya karena waktu 6 bulan yang terpotong. Secara khusus di Kampung Matutuang, proses pencairan menjadi terhambat karena mereka belum memiliki Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena proses pencairan dana disyaratkan harus juga ditandatangani oleh Sekretaris Desa yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Untuk mengatasi kendala tersebut, setelah berkomunikasi dengan Bupati, diangkat seorang Sekretaris Desa dari guru SD Matutuang yang masih berstatus PNS 80%.

Uraian-uraian di atas memberi informasi bahwa pelayanan publik di Kecamatan Kepulauan Marore dilaksanakan tidak hanya oleh pihak pemerintah baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat, juga pihak swasta melalui sinergitas dan koordinasi serta komunikasi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di dalamnya.

2. Tanggapan Masyarakat Lokal terhadap Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara

Pembangunan Infrastruktur

Setelah intervensi program dari pemerintah dan multi-pihak dalam hal pengembangan dan pembangunan infrastruktur, wajah infrastruktur di daerah ini banyak mengalami perubahan sehingga mendapat tanggapan positif dan apresiasi dari warga karena telah sesuai dengan harapan yakni mendukung kehidupan keseharian warga. Ini seperti yang terlihat dari wawancara dengan salah satu warga di Kampung Matutuang:

torang sangat berterima kasih kepada Bupati dan pemerintah pusat karena dorang so bekeng banya hal disini. Pelabuhan so bagus dan kapal so bole sandar nda brenti di tenga laut kong musti pake pumboat ka kampung. Ada warga yang dapa program perbaikan rumah deng so ada listrik 24 jam torang biar masi baru, padahal dulu sama skali nda ada listrik.

[kami sangat berterima kasih pada Bupati dan pemerintah pusat karena mereka telah membuat banyak hal disini. Pelabuhan telah representatif dan kapal sudah bisa sandar di pelabuhan, tidak hanya berhenti di tengah laut dan harus ke kampung menggunakan *pumpboat*. Ada warga yang mendapat program perbaikan rumah, termasuk telah ada listrik 24 jam disini, sekalipun baru beroperasi, padahal dahulu sama sekali tidak dialiri listrik]

Program pengembangan infrastruktur, sekalipun harus diakui menghadapi banyak tantangan, misalnya ketepatan waktu terutama karena persoalan cuaca untuk mendistribusi material ke lokasi program serta persoalan manajerial proyek, tetapi sejauh ini berjalan cukup baik. Kampung-kampung di kecamatan ini mendapat program RTLH, perbaikan jalan, listrik tenaga surya yang tentunya dalam hal realisasi tak lepas dari peran serta dinas terkait serta partisipasi maupun swadaya dari warga kampung di perbatasan, terutama program-program PNPM dan untuk menjaga kontinuitas manfaat dari infrastruktur yang tersedia seperti penggunaan dan pemeliharaan jalan desa.

Program perbaikan mess untuk aparat di setiap kampung dan perbaikan RTLH serta renovasi rumah KAT di Kawio telah membuat